

## PENGARUH POLITIK DINASTI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DENGAN PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Nikma Ragil Anggraini

Ikhsaan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is meant to: 1) to test empirically the influence of politic dynasty to the accountability of the local government, 2) to test empirically the the influence of politic dynasty to the financial performance of local government, 3) to empirically test the influence of internal control as the moderating factors to the influence of dynasty politic to the financial performance of local government. The population is all districts / cities in Banten province. The research samples by using the saturated sample technique. The data analysis technique has been carried out by using Moderated Regressions Analysis (MRA). Based on the hypothesis test, it can be concluded that: 1) politic dynasty give influence to the accountability of the local government and the performance financial of local government, 2) Politic dynasty give negative influence to the public accountability. The region which conducts the practice of politic dynasty is tend to have accountability of the financial statement of the local government is lower than the region which does not have any practice of politic dynasty, 3) the internal control as the moderating variable can minimize the negative influence of the politic dynasty practice to the financial performance of the local government.*

*Keywords: Politic dynasty, internal control, accountability, financial performance*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji secara empiris pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, 2) untuk menguji secara empiris pengaruh politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 3) untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian intern sebagai faktor memoderasi terhadap pengaruh politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1) Politik dinasti berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, 2) Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik. Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung untuk memiliki akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak melakukan praktik politik dinasti, 3) Pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi dapat meminimalisir dampak negatif praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: politik dinasti, pengendalian intern, akuntabilitas, kinerja keuangan

### PENDAHULUAN

Lahirnya pemikiran untuk melakukan suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi memberikan harapan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa sistem ini akan memberikan jawaban terhadap keraguan seluruh bangsa Indonesia yang selalu menganggap bahwa pembangunan hanya terpusat pada Pulau Jawa, pulau yang menjadi tempat pusat pemerintahan. Dulunya pemerintah pusat harus mengurus seluruh daerah yang ada di Indonesia, sehingga mau tidak mau pasti ada daerah yang akan luput dari perhatian pemerintah pusat, mengingat begitu banyak dan luasnya daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini serta tidak didukungnya dengan akses transportasi yang memadai.

Demokrasi mendorong akuntabilitas dengan menyediakan kompetisi politik, dan membantu pemerintahan untuk menjadi lebih efisien dengan mengurangi masalah *moral hazard* (Barro, 1973; Ferejohn, 1986) dan mengurangi fenomena *adverse selection* (Rogoff, 1990). Demokrasi diharapkan dapat mengurangi politisi yang tidak kompeten dan memberikan meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang efisien. Namun demikian, para politisi menghadapi masalah dalam tekanan pemilu yang dapat menyebabkan politisi untuk memanipulasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kesempatan mereka untuk pemilihan ulang (Vergne, 2009). Sistem ini membuat seseorang menjadi termotivasi untuk menjadi salah satu pejabat tertinggi dalam suatu daerah dan bisa mengatur segala urusan di dalam daerah yang di bawahinya. Dalam hal ini tidak jarang partai politik menjadi peran utama untuk mencapai tujuan seseorang. Perlu diketahui bahwa pada saat ini banyak kasus yang terjadi terkait dengan politik dinasti dalam suatu pemerintahan daerah karena adanya kekuasaan dari pemerintah daerah dan ini merupakan penyelewengan kekuasaan ketika hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap perekonomian dan pembangunan dari daerah tersebut.

Istilah dinasti politik atau politik dinasti dimengerti sebagai praktik membangun kekuasaan yang menggurita oleh sejumlah orang yang masih memiliki kaitan kekerabatan. Sejak otonomi digelar di Indonesia, yang kemudian diikuti pemilihan daerah yang digelar langsung, ada kecenderungan bermunculan dinasti-dinasti politik. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik (Amelia, 2015). Dinasti Politik saat ini banyak dibangun di beberapa Kota dan Kabupaten. Dinasti Politik merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang saling memiliki hubungan keluarga, misalnya, istri atau anak dari mantan walikota menjadi walikota selanjutnya. Dinasti Politik ini mulai terlihat di Era Reformasi yang lebih dikenal demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu rakyat juga diberi kebebasan untuk memilih wakilnya, dalam hal ini adalah Walikota atau Bupati. Namun dengan adanya Dinasti Politik ini, memberikan peluang yang sangat kecil bagi rakyat untuk terlibat di dalam proses-proses politik karena mereka yang menjadi pemimpin saling mempunyai hubungan keluarga (Amelia, 2015).

Nuritomo dan Rossieta (2014) mengatakan bahwa sebagai negara yang penduduknya memiliki rata-rata tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi, proses demokrasi sangat rentan terhadap tumbuhnya politik dinasti. Praktik politik dinasti di Indonesia semakin meningkat, terpapar jelas dari Barat Indonesia sampai Indonesia Bagian Timur. Bukan hanya Provinsi Banten, praktik politik dinasti tampaknya juga terjadi di Lampung, Riau, Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan daerah lainnya dengan sebaran yang semakin merata diseluruh Indonesia. Bukti terkini adalah pelantikan Walikota Tangerang Selatan 2011-2016 Airin Rachmi Diany. Pasangan Airin-Benyamin dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, yang tidak lain adalah kakak ipar Airin. Kali ini Airin adalah orang keempat dari keluarga besar Atut yang menjadi pejabat di empat dari delapan kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Sebelumnya, adik Atut, Tubagus Khaerul Zaman, menjadi wakil walikota Serang, adik Atut lainnya, Ratu Tatu Chasanah, menjadi wakil Bupati Serang, Adapun ibu tirinya, Heryani adalah Wakil Bupati Pandeglang (Suyadi dan Subaidi, 2014).

Meskipun politik dinasti menjadi perhatian yang besar dalam pembuatan peraturan pada Pasal 7 huruf (r) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Namun Mahkamah

Konstitusi (MK) melalui sidang putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, menganulir larangan seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana (Kepala Daerah yang sedang menjabat), yang disematkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Peraturan tersebut pun batal sebelum sempat diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini. Penelitian berkaitan tentang dinasti politik masih jarang dilakukan. Berbagai pendapat negatif mengenai politik dinasti masih memerlukan pembuktian empiris. Penelitian tentang hubungan antara politik dinasti dengan akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih sangat jarang di lakukan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. Laporan keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Tujuan utama penerapan *Good Governance* dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan (Kapucu, 2009). Menurut Crawford dan Hermawan (2009) di Indonesia, implementasi tata kelola dengan pilar transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi telah melalui berbagai tahapan. Salah satu mekanisme evaluasi implementasi tata kelola di pemerintahan adalah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (PP No. 6 Tahun 2008) yang menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber utama. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat informasi tentang seluruh pelaksanaan tugas pemerintah baik urusan desentralisasi, tugas pembantuan maupun tugas umum pemerintahan (PP No.3 tahun 2007). LPPD harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dijadikan sebagai mekanisme evaluasi tata kelola pemerintahan (PP No.3 tahun 2007).

Akuntabilitas diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan yang masih kurang dalam memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Karena Akuntabilitas dapat menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Hal tersebut akan mampu membangun kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. Laporan keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh

auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fontanella dan Rossieta (2014), Variabel yang dipilih adalah akuntabilitas pelaporan keuangan daerah sedangkan variabel desentralisasi fiskal diganti menjadi kinerja keuangan. Untuk Variabel Politik Dinasti dan Kinerja Pemerintah Daerah diambil dari penelitian Nuritomo dan Hilda Rossieta (2014) dengan pengukuran kinerja diganti menggunakan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah politik dinasti berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah?, 2) Apakah politik dinasti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?, 3) Apakah pengendalian intern memoderasi pengaruh politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?. Sedang tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menguji secara empiris politik dinasti berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, 2) Untuk menguji secara empiris politik dinasti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 3) Untuk menguji secara empiris pengendalian intern sebagai faktor memoderasi terhadap pengaruh politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih, dimana satu pihak (*agent*) setuju bertindak dengan persetujuan pihak lain (*principal*). Teori keagenan telah digunakan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah. Tujuan dari teori keagenan adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik *principal* maupun *agent*) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan *agen* sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Pada organisasi pemerintah hubungan *agent-principal* terjadi antara pemerintah (sebagai *agent*) dan rakyat sebagai *principal*. *Agency theory* memandang bahwa *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal* (Setiawan (2012)).

Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agen* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Dengan adanya asimetri maka akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi asimetri, *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya asimetri informasi ini menyebabkan kemungkinan munculnya konflik antara pihak *principal* dan *agent*. Dalam teori agensi terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Masalah keagenan juga terjadi dalam pemerintahan yang mana adanya kontrak antara *agen* (pemerintah) dengan *principal* (rakyat). Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban program pemerintah. DPRD yang dipilih oleh rakyat menjadi perwakilan rakyat, sama halnya dengan dewan komisaris yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili mereka. Proses pemilihan agen bersifat demokratis sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja agen dalam meningkatkan kesejahteraan prinsipal masih menyisakan masalah, salah satunya adalah masalah politik dinasti (Nuritomo dan Rossieta, 2014).

### **Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)**

Teori pilihan publik menggunakan asumsi dan teknik dari bidang ekonomi untuk menggambarkan, menganalisis, dan memprediksi perilaku dalam demokrasi sektor publik (Schneider dan Damapour, 2002). Teori ini berkontribusi sebagai landasan teoritis dalam refleksi besar pada ukuran dan fungsi pemerintah (Schneider dan Damapour, 2002). Teori ini diduga sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi pemerintah di seluruh dunia (Aucoin, 1990; Gray dan Jenkins, 1995).

Dari perspektif teori pilihan publik, meskipun peran utama birokrat (aparatur pemerintah) menjalankan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun birokrat sering terlibat dalam penetapan kebijakan dan menggunakan pengetahuan (informasi) khusus mereka untuk mempengaruhi dan membatasi pilihan legislator/masyarakat. Dalam kata lain, birokrat akan menggunakan wewenang yang mereka miliki dalam mengelola sumber daya semata-mata bertujuan untuk memenuhi 7 kepentingan pribadinya, termasuk dalam menentukan kebijakan penganggaran pembelanjaan publik (Schneider dan Damapour, 2002; Giroux dan Shields, 1993).

Dalam literatur pilihan publik, pemilih (masyarakat) digambarkan sebagai pihak yang relatif kurang memiliki informasi tentang keputusan politik (Giroux dan Shields, 1993). Kondisi ini kemudian menyebabkan birokrat memiliki insentif untuk membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya diketahui dasar penetapannya oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga dampaknya terjadi kehilangan kontrol (*controlloss*) dalam penyediaan barang publik, baik berupa kelebihan pasokan barang publik maupun produksi barang publik yang tidak efisien, terutama akibat dari kelalaian birokrat (Giroux dan Shields, 1993). Selain itu, dengan orientasi yang hanya mementingkan diri sendiri maka birokrat senantiasa akan membuat program dengan penganggaran yang lebih besar dan berupaya untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka (Schneider dan Damapour, 2002). Oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme yang dapat mencegah adanya distorsi informasi dan sekaligus mengontrol perilaku birokrat tersebut. Disinilah peran penting fungsi akuntansi dan audit dalam Pemerintahan, karena sebagaimana ditemukan oleh Giroux dan Shields (1993) bahwa opini audit, khususnya opini wajar tanpa pengecualian sangat efektif sebagai alat kontrol dalam mengurangi insentif birokrat untuk melakukan pembelanjaan publik.

### **Politik Dinasti**

Demokrasi yang terjadi di Indonesia membawa dampak hadirnya dinasti politik di pemerintahan. Politik dinasti dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Politik dinasti dapat diartikan secara sederhana sebagai sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan (Querrubin, 2010). Asako *et al.* (2010) mendefinisikan politisi dinasti seperti mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka. Nuritomo dan Rossieta (2014) menyebutkan politik dinasti sebagai perpindahan maupun

perluasaan kekuasaan dalam level eksekutif (kepala daerah) yang dilakukan dalam suatu keluarga (baik sedarah maupun semenda).

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Filipina mengalami dinasti politik sejak negara itu lahir. Nama-nama seperti Macapagal, Aguilar, Cojuangco, Aquino, Magsaysay, dan puluhan keluarga lain mendominasi politik Filipina selama puluhan tahun. Di Thailand dinasti politik tumbuh dengan subur, seperti misalnya keluarga Vejajiva dan keluarga Shinawatra. Keduanya menguasai politik Thai selama dua dekade belakangan ini. Di Amerika juga ada beberapa keluarga yang punya pengaruh kuat di dalam politik nasionalnya. Keluarga Bush, Kennedy, Rockefeller, dan lain sebagainya itu terkenal memiliki pengaruh yang besar dalam politik. Sistem boleh berganti. Tapi keluarga-keluarga ini tetap punya pengaruh (Sakinah, *et al*, 2012).

### **Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2014: 39) akuntabilitas memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, akuntabilitas mengharuskan tiap badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu badan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akuntabilitas merupakan bentuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah sebuah konsep yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Van Helden dan Reichard, 2013). Berbeda dengan pengukuran kinerja sektor swasta, Van Helden & Reichard (2013) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik memiliki lebih banyak dampak dan faktor eksternalnya, karena sampai kepada *outcome* dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran tertentu.

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai dan diperoleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah (Nuritomo dan Rossieta, 2014).

Pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah sangat penting, menurut Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia, untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Namun demikian, pengukuran kinerja pada sektor publik dapat dilihat dari sejauhmana indikator pengukuran kinerja relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan

organisasi sektor publik untuk berbagai tujuan yang lebih luas, seperti perencanaan dan pengendalian, pembelajaran, akuntabilitas dan evaluasi, termasuk pelaporan indikatornya. Sementara itu, penentuan target indikator kinerja dan analisis terhadap varians target dengan realisasi indikator kinerja juga menjadi elemen utama manajemen kinerja pada sektor publik.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Salah satu wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) adalah dengan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 butir 1, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 terdiri dari: 1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revui, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### **Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung untuk memiliki akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak melakukan praktik ini, sehingga terdapat korelasi negatif terhadap daerah yang melakukan politik dinasti, karena dimungkinkan akan memiliki opini atas laporan keuangan yang lebih buruk dibandingkan daerah yang tidak melakukan praktik ini (Nuritomo dan Rossieta, 2014). Bila dilihat dari sisi pemegang amanah, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada, sehingga laporan keuangan daerah berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Asako et al.*, (2010) menyatakan bahwa politik dinasti berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan melemahkan daya saing pemilu. Mereka menemukan bahwa daerah-daerah di bawah kendali politisi dinasti kurang efektif dalam membawa pembangunan ekonomi kepada masyarakat, meskipun mereka menerima alokasi anggaran yang lebih dari pemerintah pusat. Sedangkan *Mendoza et.al* (2012) menemukan bahwa prevalensi politik dinasti tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang tinggi, standar hidup yang rendah atau pembangunan manusia. Keberadaan politik dinasti juga mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena politisi dinasti memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pemilihan umum (Quetrubin, 2010). Hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas dari calon kepala daerah sehingga

dapat mempengaruhi pengelolaan dana publik, bagaimana menghasilkan pembangunan ekonomi dan mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Politik dinasti yang menurunkan jabatan maupun memperluas kekuasaan eksekutif kepada keluarga dapat menyebabkan penurunan kinerja dan menghambat pembangunan ekonomi (Asako *et al.*, 2010). Keberadaan dinasti politik juga mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena politisi dinasti memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pemilihan umum (Querubin, 2010) sehingga dapat mengakibatkan tidak lolosnya calon yang berkompten. Hal ini menyebabkan munculnya kepala daerah dengan kualitas yang rendah dan pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dana publik dan menghasilkan pembangunan ekonomi.

Untuk mengetahui capaian kegiatan pemerintah harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah (tata kelola) karena proses evaluasi merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian kegiatan. Evaluasi kinerja penting dilakukan karena dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2007). Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Alasan ini akan menjadikan pemerintah daerah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga pemerintah daerah akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Pengawasan dan penilaian publik akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Mahmudi, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa ditemukan pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan politik dinasti yang berjalan saat ini. Hal tersebut dimungkinkan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang kurang baik sehingga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

### **Pengendalian Intern Sebagai Faktor Pemoderasi Terhadap Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah sangat diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah agar penggunaannya tepat sesuai tujuan dan bebas dari penyalahgunaan oleh kepentingan individu atau kelompok. Jika penerapan pengendalian internal berjalan dengan baik maka kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan, begitu juga sebaliknya jika penerapan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan anggaran daerah.

Untuk hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan kinerja pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika sistem pengendalian internal pemerintah semakin baik, maka kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal pemerintah dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran.



sistem pengendalian internal pemerintah yang telah dilakukan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Mardiasmo (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena sistem pengendalian internal pemerintah juga akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sehingga akan mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas.

Politik patrimonial yang kuat dalam politik telah menempatkan lembaga-lembaga demokrasi dalam posisi yang rapuh (Choi, 2009) dan berdampak pada *checks and balances* kurang efektif. Masalah ini dapat diminimalisasi dengan sistem tata kelola yang baik dan proses checks dan balances yang lebih kuat melalui sistem pengendalian internal yang kuat. Penelitian yang dilakukan Donaldson (2005) bahwa peningkatan kualitas pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas dan transparansi dalam informasi keuangan. Effendi (2009) dan Murhaban (2010) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi dapat meminimalisir dampak negatif praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian**

Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, dalam hal ini diperlukan adanya metode penelitian yang terkandung dalam tujuan penelitian, mengingat maksud dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal (*causal research*), yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:74).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:119). Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka yang ada di Provinsi Banten

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan dapat membuat kita menggeneralisasikan sifat atau karakteristik pada elemen populasi (Arikunto, 2012:115). Dikarenakan jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten berjumlah 8 yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, maka diputuskan bahwa semua populasi akan dijadikan sampel penelitian. Penelitian yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian disebut juga sebagai sampel jenuh atau disebut juga dengan sensus (Arikunto, 2012:115). Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang digunakan sebagai sampel penelitian meliputi: Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta pencarian menggunakan media surat kabar maupun media *online* untuk memastikan daerah yang terindikasi politik dinasti dan non politik dinasti. Karena pemerintah tidak mempublikasikan data tentang daerah yang terindikasi politik dinasti maka penelusuran data ini dilakukan oleh peneliti

dengan menggunakan berbagai media tersebut. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumenter yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Variabel bebas yaitu politik dinasti (PD), 2) Variabel terikat yaitu akuntabilitas pemerintah (AP) dan kinerja keuangan (KK), 3) Variabel pemoderasi yaitu sistem pengendalian intern (PI), 4) Variabel kontrol yaitu asset (AS), dana perimbangan (DP), belanja pegawai (BP), dan belanja modal (BM).

### Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian adalah akuntabilitas pemerintah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas diukur dengan menggunakan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian, nilai 2 untuk opini wajar dengan pengecualian, nilai 3 untuk opini tidak menyatakan pendapat dan nilai 4 untuk opini tidak wajar (Nuritomo dan Rossieta, 2014). Kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah rasio kemandirian daerah. Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan rumus berikut (Halim, 2010):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total PAD}}{(\text{DBHP} + \text{SDA} + \text{DAU} + \text{DAK})} \times 100\%$$

Variabel Independen dalam penelitian adalah: praktik politik dinasti yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika daerah tersebut terindikasi menjalankan politik dinasti pada kepala daerah dan nilai 0 untuk daerah yang tidak menjalankan praktik politik dinasti (Nuritomo dan Rossieta, 2014).

Variabel pemoderasi: penelitian ini memasukan variabel sistem pengendalian internal sebagai faktor yang dapat melemahkan antara praktik politik dinasti dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sebagai salah satu variabel penentu tata kelola pemerintahan yang baik, pengendalian internal diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal diukur dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sistem pengendalian intern yang diukur berdasarkan dengan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah berdasarkan laporan BPK RI (Nuritomo dan Rossieta, 2014).

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: 1) Asset sebagai ukuran daerah, diukur menggunakan jumlah total aset daerah, 2) Dana Perimbangan diukur dengan total pendapatan berasal dari pusat, merupakan penjumlahan antara dana bagi hasil pusat, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diterima daerah sesuai yang dilaporkan pada laporan keuangan pemerintah daerah, 3) Belanja Pegawai, diukur dengan besar belanja pegawai yang dikeluarkan daerah sesuai yang dilaporkan pada laporan keuangan pemerintah daerah, 4) Belanja Modal, diukur dengan besar belanja modal yang dikeluarkan daerah sesuai yang dilaporkan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati dan Porter, 2009). Selain itu analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011:96).

Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

Model pengujian 1

$$AP = \alpha_0 + \beta_1 PD + \beta_2 AS + \beta_3 DP + \beta_4 BP + \beta_5 BM + \beta_6 SPI + \epsilon_{i,t}$$

Model pengujian 2

$$KK = \alpha_0 + \beta_1 PD + \beta_2 PD * PI + \beta_3 AS + \beta_4 DP + \beta_5 BP + \beta_6 BM + \beta_7 SPI + \epsilon_{i,t}$$

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2011). Variabel perkalian antara politik dinasti (PD) dan sistem pengendalian intern (PI) merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel pengendalian intern (PI) terhadap hubungan politik dinasti (PD) dan akuntabilitas pemerintah daerah (AP).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas  $VIF = 1/Tolerance$ , jika  $VIF = 10$  maka  $Tolerance = 1/10 = 0,1$  (Ghozali, 2011:106).

#### Uji Heterokedastisitas

Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik; dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual dari (Y prediksi - Y sebelumnya) yang telah di *studentized*. Dasar dalam pengambilan keputusan: 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas, 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

#### Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam pendekatan grafik Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2009:214). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut: 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas

### Uji Kelayakan Model

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel keterbatasan sistem informasi dan komitmen manajemen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel akuntabilitas kinerja (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengujian: 1) P-value < 0.05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian, 2) P-value > 0.05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Interpretasi: 1) Jika  $R^2$  mendekati 1 (semakin besar nilai  $R^2$ ), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak, 2) Jika  $R^2$  mendekati 0 (semakin kecil nilai  $R^2$ ), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

### Pengujian Hipotesis (uji t)

Pengujian hipotesis merupakan proses pembuatan keputusan yang menggunakan estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya, karena pengujian hipotesis, sebagai salah satu tujuan utama penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2010:214). Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian. Kriteria pengujian: 1)  $H_0$  diterima jika  $P_{\text{Value}} > \alpha = 0,05$ , berarti variabel bebas secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat, 2)  $H_0$  ditolak jika  $P_{\text{Value}} < \alpha = 0,05$ , berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model pengujian regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (*Moderated Regression Analysis*), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Dalam penelitian ini akan digunakan uji *Moderated Regression Analysis*, hipotesis moderating diterima jika variabel Moderasi Pengendalian Intern (Politik Dinasti\*Pengendalian Intern) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dan juga berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan kriteria  $P_{\text{Value}} < \alpha = 0,05$ .

## ANALISIS DATA

### Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskripsi**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	24	1.00	2.00	1.25	.44
Politik Dinasti	24	.00	1.00	.62	.49
Total Asset	24	28.10	30.45	29.11	.65
Dana Perimbangan	24	27.06	28.34	27.64	.32
Belanja Pegawai	24	26.88	27.86	27.45	.32
Belanja Modal	24	25.74	29.19	26.87	.80
Pengendalian Intern	24	.00	4.00	1.37	1.34
Kinerja Keuangan	24	6.74	173.63	67.88	45.67

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasar Tabel 1 dapat diketahui jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 72 pengamatan, berdasarkan 4 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2011-2014), dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilai *mean*, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing-masing variabel yang diteliti. Nilai *mean* merupakan nilai yang menunjukkan besaran pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Secara umum, rata-rata ukuran daerah yang dilihat dari total asset sebesar 29,11 atau sebesar Rp 5,461,422,707,701 dengan total asset tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Tangerang sebesar Rp 16,739,727,008,753.50 tahun 2014 dan terendah total asset dimiliki oleh Kota Serang sebesar Rp 1,593,483,954,120.00 pada tahun 2013. Rata-rata Pendapatan daerah yang berasal dari pusat (dana perimbangan) adalah sebesar 27,64 atau sebesar Rp 1,055,179,402,749.92. Dengan dana perimbangan tertinggi sebesar Rp 2,029,076,551,315 di daerah Kabupaten tangerang pada tahun 2013 dan terendah adalah sebesar Rp 564,516,830,610. Belanja pegawai yang dikeluarkan rata-rata adalah sebesar 27,45 atau sebesar Rp 879,608,465,270.54 pertahun. Belanja pegawai terbesar adalah di daerah Kota tangerang sebesar Rp 1,259,450,268,660 dan terendah adalah di Kota Serang sebesar Rp 474,031,888,017 . Belanja modal terbesar adalah di daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4,750,206,918,181 dan terendah adalah di daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 268,779,412,269 dengan rata-rata belanja modal 26,87 atau sebesar Rp 698,830,479,422.17. Jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Rata-rata Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah sebesar 67,88, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar kepada pusat. Kemandirian daerah menunjukkan bahwa daerah masih memiliki kemandirian yang rendah. Sistem pengendalian intern menunjukkan rata-rata jumlah temuan pada setiap laporan keuangan adalah sebanyak 1,37 temuan.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di atas 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas Model 1**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PD	.600	1.666
AS	.236	4.236
PS	.224	4.466
1 PB	.219	4.560
BM	.233	4.284
PI	.284	3.521

a. Dependent Variable: AP

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasar Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada nilai VIF yang melebihi 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gangguan multikolinieritas.

**Tabel 3**  
**Uji Multikolinieritas Model 2**

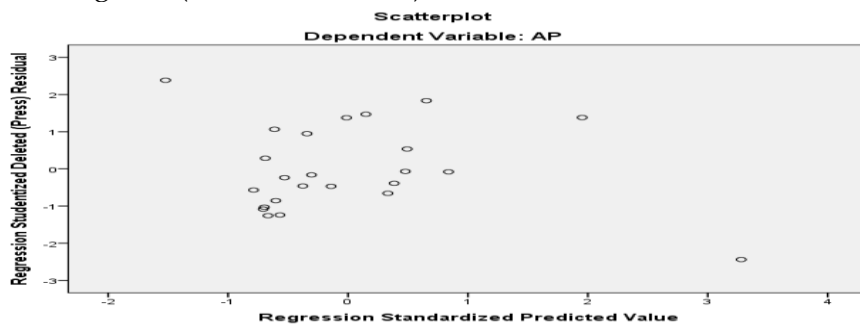
Coefficients <sup>a</sup> Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PD	.950	1.079
PD*PI	.917	1.168
AS	.217	4.604
1 PS	.219	4.559
PB	.210	4.769
BM	.232	4.303
PI	.826	2.123

a. Dependent Variable: KK  
Sumber: Hasil Output SPSS

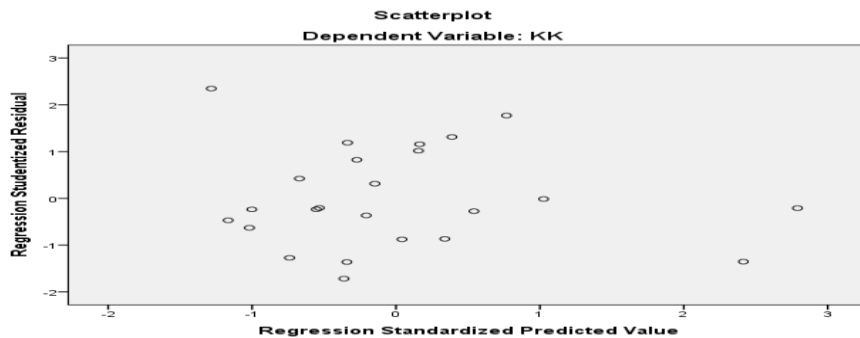
Berdasar Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada nilai VIF yang melebihi 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gangguan multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Salah satu metode yang dipakai untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah melalui pendekatan grafik (Santoso, 2009:210).



**Gambar 1**  
**Uji Heteroskedastisitas Model 1**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**



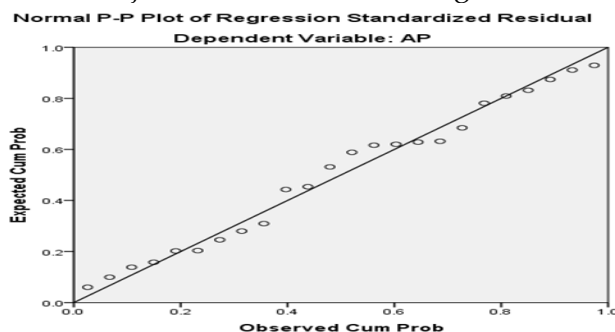
**Gambar 2**  
**Uji Heteroskedastisitas Model 2**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**

Dari gambar 1 dan gambar 2 atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas

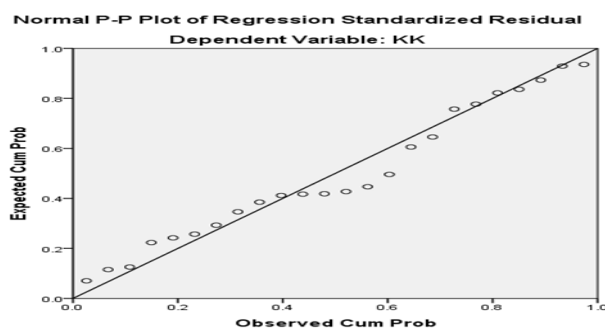
pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

### Uji Normalitas

Hasil scatter plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:



**Gambar 3**  
**Uji Normalitas Model 1**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**



**Gambar 4**  
**Uji Normalitas Model 2**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar dan mendekati garis diagonal. Dengan demikian Gambar 3 dan Gambar 4 telah terdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan pengujian asumsi klasik lainnya.

### Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi kita harus melihat nilai uji Durbin Watson. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi Model 1**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1,429 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), PI, PB, PD, AS, BM, PS

b. Dependent Variable: AP

Sumber: Hasil Output SPSS

Hasil perhitungan autokorelasi model I, diperoleh nilai *Durbin Watson* adalah sebesar 1,429. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi Model 2**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	1.859 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), PI, PB, PD, AS, BM, PS, PD\*PI

b. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil Output SPSS

Hasil perhitungan autokorelasi model 2, diperoleh nilai *Durbin Watson* adalah sebesar 1,859. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil analisis regresi dapat di lihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda Model 1**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.920	2.549		3.499	.003
	PD	-.211	.071	-.125	-2.973	.009
	AS	.171	.086	.252	1.981	.064
	PS	.472	.179	.345	2.639	.017
	BP	.284	.180	.208	1.572	.134
	BM	.077	.071	.140	1.092	.290
	PI	.307	.038	.933	8.035	.000

a. Dependent Variable: AP

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, maka dapat diperoleh Model Persamaan Regresi adalah:

$$AP = 8,920 - 0,211PD + 0,171AS + 0,472PS + 0,284B + 0,077BM + 0,307PI$$

**Tabel 7**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda Model 2**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.880	1.215		2.370	.025
	PD	-1.211	0.506	-.002	-2.393	.025
	PD*PI	-2.976	1.111	-.097	-2.679	.014
	AS	55.899	19.193	.799	2.912	.010
	PS	145.318	38.530	1.029	3.772	.002
	BP	45.152	39.330	.320	1.148	.268
	BM	9.657	15.113	.169	.639	.532
	PI	29.596	11.966	.607	2.474	.022

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil Output SPSS



Berdasarkan Tabel 7 tersebut, maka dapat diperoleh) Model Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut.

$$KK = 2,880 - 1,211PD - 2,976PD*PI + 55,899AS + 145,318PS + 45,152BP + 9,657BM + 29,596PI$$

### Pengujian *Goodness of Fit*

Pada Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilihat hasil dari Uji F yang dilakukan.

**Tabel 8 Model 1**  
**Hasil Uji Statistik Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.207	6	.701	40.675	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.293	17	.017		
	Total	4.500	23			

a. Dependent Variable: AP

b. Predictors: (Constant), PI, PB, PD, AS, BM, PS

Sumber: Pengolahan data SPSS

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 40,675 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga simpulannya model 1 yang digunakan dalam penelitian layak.

**Tabel 9 Model 2**  
**Hasil Uji Statistik Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35424.552	7	5060.650	6.457	.001 <sup>b</sup>
	Residual	12539.065	16	783.692		
	Total	47963.616	23			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), PI, PB, PD, AS, BM, PS, PD\*PI

Sumber: Pengolahan data SPSS

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6,457 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga simpulannya model 2 yang digunakan dalam penelitian layak.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *Adjusted R-Square* yang diperoleh disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

**Tabel 10**  
**Nilai *Adjusted R-Square* Model 1**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	
1	.967 <sup>a</sup>	.935	.912	.13129	

a. Predictors: (Constant), SPI, PB, PD, AS, BM, PS

Sumber: Pengolahan data SPSS

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai *adjusted* R sebesar 0,935 atau 93,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa 93,5% perubahan akuntabilitas pemerintah dipengaruhi oleh politik dinasti (PD), asset (AS), dana transfer (PS), belanja pegawai (BP), belanja modal (BM) dan pengendalian intern (SPI) sedang sisanya 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

**Tabel 11**  
**Nilai *Adjusted R-Square* Model 2**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.859 <sup>a</sup>	.739	.624	27,99449

a. Predictors: (Constant), SPI, PB, PD, AS, BM, PS, PD\*PI  
Sumber: Hasil Olahan SPSS

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai *adjusted* R sebesar 0,739 atau 73,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa 73,9% perubahan kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh politik dinasti (PD), politik dinasti\**pengendalian intern* (PD\*PI), asset (AS), dana transfer (PS), belanja pegawai (BP), belanja modal (BM) dan *pengendalian intern* (SPI) sedang sisanya 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

**Pengujian Hipotesis**

**Pengujian Model 1: Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas**

**Tabel 12**  
**Hasil Perhitungan uji t Model 1**  
**Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas**

Variabel	<i>t</i> <sub>hitung</sub>	Sig	Keterangan
Politik Dinasti (PD)	-2.973	.009	Berpengaruh
Asset (AS)	1.981	.064	Tidak berpengaruh
Dana Perimbangan (PS)	2.639	.017	Berpengaruh
Belanja Pegawai (BP)	1.572	.134	Tidak berpengaruh
Belanja Modal (BM)	1.092	.290	Tidak berpengaruh
Pengendalian Intern (PI)	8.035	.000	Berpengaruh

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 12 hasil perhitungan uji t model 1 digunakan untuk menjawab hipotesis H<sub>1</sub>. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi politik dinasti terhadap akuntabilitas adalah 0,009 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa politik dinasti berpengaruh negative dan signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan demikian H<sub>1</sub> terdukung. Sedang variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas adalah dana perimbangan dengan sig sebesar 0,017 < 0,05 dan *pengendalian intern* dengan sig sebesar 0,000 < 0,005. Sedangkan variabel kontrol asset tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dengan sig 0,064 > 0,05, variabel belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dengan sig 0,134 > 0,05 dan belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dengan sig sebesar 0,290 > 0,05.

## Pengujian Model 2: Politik Dinasti terhadap Kinerja: PI Sebagai Pemoderasi

Tabel 13  
Hasil Perhitungan Uji t Model 2  
Politik Dinasti terhadap Kinerja: SPI Sebagai Pemoderasi

Variabel	t <sub>hitung</sub>	Sig	Keterangan
Politik Dinasti (PD)	-2.393	.025	Berpengaruh
Politik Dinasti * Pengendalian Intern (PD*PI)	-2.679	.014	Berpengaruh
Asset (AS)	2.912	.010	Berpengaruh
Dana Perimbangan (PS)	3.772	.002	Berpengaruh
Belanja Pegawai (BP)	1.148	.268	Tidak berpengaruh
Belanja Modal (BM)	.639	.532	Tidak berpengaruh
Pengendalian Intern (PI)	2.474	.022	Berpengaruh

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 13 hasil perhitungan uji t model 2 digunakan untuk menjawab hipotesis H<sub>2</sub> dan H<sub>3</sub>. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi politik dinasti terhadap kinerja keuangan adalah  $0,025 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H<sub>2</sub> terdukung.

Variabel Pengendalian Intern sebagai pemoderasi terhadap politik dinasti mampu mempengaruhi kinerja keuangan dengan sig sebesar  $0,14 < 0,05$ , dengan demikian hipotesis H<sub>3</sub> yang menyatakan Akuntabilitas publik yang diproksikan oleh pengendalian intern dapat meminimalisir dampak negatif praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terdukung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Effendi (2009) dan Murhaban (2010) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Donaldson (2005) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas dan transparansi dalam informasi keuangan.

Sedang variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan adalah asset dengan sig sebesar  $0,10 < 0,05$ , variabel dana perimbangan dengan sig sebesar  $0,017 < 0,05$  dan pengendalian intern dengan sig sebesar  $0,002 < 0,05$  dan variabel pengendalian intern dengan sig sebesar  $0,022 < 0,05$ . Sedangkan variabel kontrol variabel belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan sig  $0,268 > 0,05$  dan belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan sig sebesar  $0,532 > 0,05$ .

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Praktik Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pengujian pengaruh praktik politik dinasti terhadap akuntabilitas keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linier berganda ini dilakukan untuk menguji pengaruh praktik politik dinasti terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah sebagai proksi akuntabilitas publik dengan menggunakan variabel ukuran daerah, jumlah penerimaan dari pusat, jumlah belanja modal, belanja pegawai, sistem pengendalian intern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik. Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung untuk memiliki akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak melakukan praktik ini. Pada pengujian, angka yang lebih besar menunjukkan opini yang lebih buruk, sehingga korelasi positif dalam

sampel menunjukkan bahwa daerah yang melakukan politik dinasti akan memiliki opini atas laporan keuangan yang lebih buruk dibandingkan daerah yang tidak melakukan praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 penelitian ini yang menyatakan bahwa praktik politik dinasti berpengaruh negatif akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terbukti.

### **Pengaruh Praktik Politik Dinasti terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Politik dinasti yang menurunkan jabatan maupun memperluas kekuasaan eksekutif kepada keluarga dapat menyebabkan penurunan kinerja dan menghambat pembangunan ekonomi (Asako *et al.*, 2012). Keberadaan dinasti politik juga mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena politisi dinasti memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pemilihan umum (Querubin, 2010) sehingga dapat mengakibatkan tidak lolosnya calon yang berkompten. Hal ini menyebabkan munculnya kepala daerah dengan kualitas yang rendah dan pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dana publik dan menghasilkan pembangunan ekonomi. Peneliti mencoba untuk menguji hubungan antara praktik politik dinasti dengan kinerja keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berpengaruhnya praktik politik dinasti dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh besarnya pengaruh pusat terhadap daerah.

Berdasarkan deskripsi penelitian yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mencapai 67,88%, secara umum daerah-daerah di Indonesia masih tidak mandiri dalam hal keuangannya. Terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, akan tetapi sumber pendanaan yang ada adalah melalui dana bagi hasil sumber daya alam yang besar seperti yang diterima Kabupaten Tangerang. Bagi hasil sumber daya alam seperti ini biasanya tidak membutuhkan suatu pengelolaan khusus karena hal ini hanya berdasarkan kinerja pemerintah daerah pengelola sumber daya alam tersebut sedangkan daerah hanya akan menerima bagi hasil sesuai dengan kinerja pemerintah daerah tersebut. Ketergantungan pada pusat akan menyebabkan upaya pemerintah daerah menjadi menurun. Dana pusat yang besar berkorelasi positif dengan peningkatan PAD, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan dana pusat yang besar cenderung akan lebih "malas" dalam memperoleh pendanaan dari PAD. Peningkatan PAD suatu daerah juga dapat dipengaruhi oleh jumlah belanja modal yang dikeluarkan maupun jumlah belanja pegawai. Daerah yang memiliki belanja modal yang tinggi dapat menghasilkan PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan belanja modal yang rendah, sedangkan daerah dengan belanja pegawai yang tinggi cenderung memiliki peningkatan PAD yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi belanja pegawai yang akan mengurangi proporsi belanja modal daerah dan berakibat pada rendahnya peningkatan PAD.

### **Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Hubungan Praktik Politik Dinasti dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat dampak diterapkannya akuntabilitas publik yang baik melalui penerapan sistem pengendalian intern di pemerintah daerah terhadap pengaruh praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian intern sesuai dengan amanat PP No 60 Tahun 2008 merupakan salah satu langkah untuk mencapai *good governance*. Sistem pengendalian intern yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada pemerintah daerah serta mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dengan proksi sistem pengendalian intern memiliki koefisien negatif secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif (ukuran sistem

pengendalian intern adalah berdasarkan jumlah temuan kelemahan SPI oleh BPK RI, sehingga jumlah temuan yang besar mengindikasikan SPI yang lemah) terhadap hubungan politik dinasti dengan kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, hasil pengujian tidak memberikan hasil yang signifikan.

Dalam analisis sensitivitas yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membagi daerah dengan kategori sistem pengendalian intern baik dan buruk. Daerah dengan jumlah temuan diatas median sampel dikategorikan sebagai daerah dengan sistem pengendalian intern yang buruk sedangkan daerah dengan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern dibawah median dikategorikan sebagai daerah dengan sistem pengendalian intern yang baik. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dampak negatif praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hanya terjadi pada daerah dengan sistem pengendalian intern yang buruk. Pengaruh negatif ini tidak terjadi pada daerah dengan sistem pengendalian yang baik. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern mampu meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik politik dinasti.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat memperlemah dampak negatif praktik politik dinasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terbukti. Hasil pengujian secara keseluruhan konsisten dengan pengujian sebelumnya. Peningkatan PAD dipengaruhi oleh jumlah belanja modal yang dikeluarkan maupun jumlah belanja pegawai. Daerah yang memiliki belanja modal yang tinggi dapat menghasilkan PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan belanja modal yang rendah, sedangkan daerah dengan belanja pegawai yang tinggi cenderung memiliki peningkatan PAD yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi belanja pegawai yang akan mengurangi proporsi belanja modal daerah dan berakibat pada rendahnya peningkatan PAD.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya keterbatasan sistem informasi akan menjadi penghalang bagi pemimpin dalam instansi pemerintah untuk mendapatkan data dengan tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga kemampuan pemimpin dalam menggunakan sistem pengukuran kinerja pun menjadi terbatas. Hal ini akan menjadi penghambat bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem pengukuran, akuntabilitas dan penggunaan informasi kinerja guna menghasilkan kinerja yang lebih baik. Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Pemerintah Kota Surabaya. Keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.

### **Keterbatasan**

Tidak dilakukan wawancara, menyebabkan kurangnya pemahaman atas jawaban yang diberikan oleh responden. Lingkup objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada satuan kerja Pemerintah Kota Surabaya.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. Perluas lingkup objek penelitian untuk meningkatkan generalisasi kesimpulan hasil

penelitian dan perbandingan hasil penelitian yang terkait dengan implementasi kinerja instansi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. P. 2015. Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo. *Jurnal Politik Muda*. Vol. 4(3): 319-327.
- Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi and M.Ueda. 2010. Dynastic Legislators: Theory And Evidence From Japan. *Working Papers*. Waseda University Organization for Japan-US Studies.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Effendi, A. 2009. Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas. *Disertasi FE Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Fontanella, A dan H. Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium XVII Lombok*.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Cetakan kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, D. dan D. C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*, 5th Edition. New York. McGraw-Hill Book Co.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Jensen, M. dan Meckling, W.H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3: pp. 305-60.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Murhaban. 2010. Pengaruh Pengendalian Intern, Audit Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Disertasi*. FE Universitas Padjadjaran Bandung.
- Narbuko, C dan A. Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Cetakan kedua belas. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Nuritomo dan H. Rossieta. 2014. Politik Dinasti, Akuntabilitas, Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17*. Mataram Lombok. Universitas Mataram.
- Putri, G. Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Querrubin, P. 2010. *Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines*.

- Schneider, Marguerite dan Fariborz Damanpour. 2002. Public Choice Economics And Public Pension Plan Funding: An Empirical Test. *Administration and Society*, 34 (1-Mar): pp 57 - 86
- Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suyadi dan Subaidi. 2014. Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. Rajawali Press. Jakarta.
- Vergne, C. 2009. Democracy, Elections And Allocation Of Public Expenditures In Developing Countries. *European Journal of Political Economy* Vol. 25(1) March: pp 63-77.